

## HARAPAN TERHADAP 18 PROYEK HILIRISASI

- ▲ Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara
- 🌐 Meningkatkan devisa
- 👥 Menyerap tenaga kerja besar-besaran
- 🏠 Meningkatkan kualitas tenaga kerja
- 🚫 Mengurangi impor
- 🏭 Mengembangkan industri pendukung
- 🌐 Meningkatkan daya saing global
- 🏠 Meningkatkan investasi
- 🏠 Memeratakan pembangunan
- ♻️ Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

# HARAPAN PADA 18 PROYEK HILIRISASI RP 618 TRILIUN

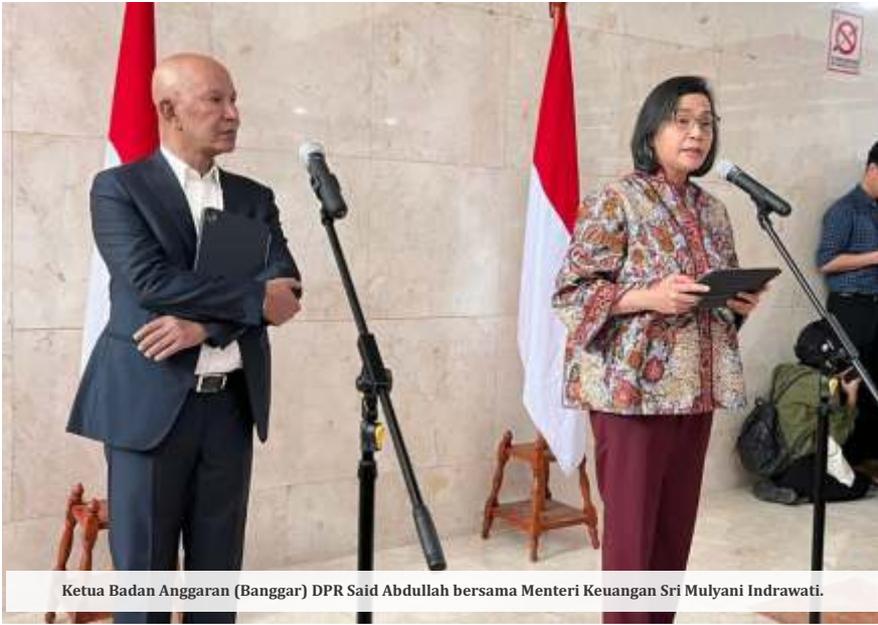
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional mulai dari proyek hilirisasi mineral dan batu bara, transisi energi, hingga hilirisasi kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu bentuk realisasi dan langkah konkret percepatan agenda hilirisasi nasional tersebut, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyerahkan secara resmi dokumen Pra-Studi Kelayakan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani, di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (22/7/2025). Bahlil mengatakan total nilai investasi dari 18 proyek ini mencapai US\$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun. Dari mega proyek ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, menjadikan kemandirian industri dan daya saing global, menumbuhkan ekonomi inklusif, dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

[BACA HAL 11...](#)

## PENYERAHAN DOKUMEN PRA-STUDI KELAYAKANAN PROYEK PRIORITAS HILIRISASI DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL



Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia kepada CEO Danantara Rosan Roeslani, di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (22/7/2025).



Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

**Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan belanja negara dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) 2026 mencapai Rp 3.800 hingga Rp 3.820 triliun. Anggaran tersebut lebih tinggi dari APBN 2025 yaitu Rp 3.621,3 triliun. Peningkatan anggaran belanja tersebut seiring dengan peningkatan Produk Domestik Bruto.**

**D**alam rapat bersama pemerintah, Badan Anggaran menyepakati belanja negara berada di kisaran 14,19 hingga 14,83 persen dari Produk Domestik Bruto. Batas maksimal sebesar 14,83 naik dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah yaitu 14,75 persen. Meski begitu, target ini masih lebih rendah dari proyeksi 2025 yang ditargetkan sebesar 14,82 persen dari PDB. Di mana APBN 2025 senilai Rp3.621,3 triliun, artinya menjelaskan 16,36% dari PDB (PDB 2024 Rp22.139 triliun).

Meski demikian, Said mengatakan bahwa angka pasti RAPBN 2026 akan termuat dalam Nota Keuangan yang akan dibacakan oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna, 15 Agustus mendatang.

“Kalau 2026, kan, pemerintah pasti menunggu tren dulu, semester satu seperti apa pertumbuhannya. Nanti ke depan kira-kira di awal-awal kuartal ketiga Nota Keuangan itu masuk, itu sudah bisa diprediksi,” kata Said ketika ditemui wartawan setelah rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Banggar juga menyepakati rasio pendapatan negara yang berada di kisaran 11,71-12,31 persen dari Produk Domestik Bruto. Batas atas target pendapatan ini meningkat dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah yaitu sebesar 12,22 persen dari PDB.

“Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya kebijakan, dan program untuk meningkatkan

pendapatan negara yang mencapai kisaran 11,71 persen hingga 12,31 persen dari PDB,” ucap anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan dalam rapat.

Untuk asumsi dasar makro 2026, pertumbuhan ekonomi disepakati pada level 5,2-5,8 persen. Kemudian, laju inflasi disepakati sebesar 1,5 hingga 3,5 persen; nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar Amerika Serikat; dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,6 hingga 7,2 persen.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar US\$60-US\$80 per barel. Sementara itu, batas bawah dan batas atas lifting minyak bumi mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari. Sedangkan Banggar menyetujui agar lifting minyak bumi berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari. Banggar juga menyepakati lifting gas bumi 953 ribu-1.017.000 barel per hari, seperti yang diusulkan pemerintah.

Sementara melihat lebih dalam hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 tersebut, rasio belanja negara dipasang pada rentang 14,19%—14,83% dari PDB.

Angka tersebut lebih tinggi dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 yang sebesar 14,19% hingga 14,75%.

Secara tren, belanja negara terus mengalami kenaikan. Bahkan sejak 2022, belanja negara mulai menyentuh Rp3.096,2 triliun. Kemudian naik menjadi Rp3.121,2 triliun pada 2023 dan mencapai Rp3.412,2 triliun pada 2024.

Selain postur belanja, DPR dan pemerintah juga telah mengesahkan rasio pendapatan, keseimbangan primer, defisit, maupun pembiayaan APBN tahun kedua Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan Panja. Penjelasan laporan

# APBN 2026 Diperkirakan Capai Rp3.820 Triliun

Panja tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 mendatang.

“Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari pimpinan Banggar, anggota Panja, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini,” ujar Menkeu.

Rapat ini menjadi bagian penting dari rangkaian tahapan penyusunan APBN 2026 yang disusun secara transparan dan kolaboratif, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan DPR dalam menjaga kesinambungan fiskal serta stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi di tengah tantangan global yang makin kompleks.

“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Menkeu.

Untuk mewujudkan ketahanan nasional, Menkeu mengungkapkan pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Intervensi negara diperlukan secara proporsional,

terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

“Prinsip utama yang mendasari adalah 'the greatest good for the greatest many', yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” ujar Menkeu. (rls,ist/lut)

## BERIKUT POSTUR MAKRO FISKAL 2026:

INDIKATOR	KEMPPKF 2026 (%)	KESEPAKATAN PANJA
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>11,71-12,22</b>	<b>11,71-12,31</b>
○ Perpajakan	10,08-10,45	10,08-10,54
○ PNB	1,63-1,76	1,63-1,76
○ Hibah	0,002-0,003	0,002-0,003
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>14,19-14,75</b>	<b>14,19-14,83</b>
○ Belanja Pemerintah Pusat	11,41-11,86	11,41-11,94
○ Transfer ke Daerah	2,78-2,89	2,78-2,89
<b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(0,18)-(0,22)</b>	<b>(0,18)-(0,22)</b>
<b>DEFISIT</b>	<b>(2,48)-(2,53)</b>	<b>(2,48)-(2,53)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>2,48-2,53</b>	<b>2,48-2,53</b>

# DPR RI Pertanyakan Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 17 Persen



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen di tahun 2024 yang hanya terealisasi 17 persen atau ada sisa sekitar Rp 80 Triliun. Dolfie juga menyebutkan tidak tercapainya realisasi anggaran Pendidikan terjadi pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

**P**ertanyaan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan terkait Pembahasan LKPP Kemenkeu TA 2024 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007, komponen anggaran pendidikan, termasuk gaji guru, merupakan bagian dari belanja dan harus dihitung dalam alokasi 20 persen sebagaimana amanat dari konstitusi terkait Pendidikan sebagai mandatory spending.

"Saya ingin tanya Bu Menteri semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. 2024 realisasi anggaran pendidikan 20 persen berapa Bu, 2024?" tanya Dolfie.

"Yang 2024 tadi Bu Menteri mengatakan 17%, 3% yang tidak direalisasikan itu, kalau kita hitung dengan nilai, itu Rp80 triliun. Kalau Rp80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat," katanya.

Kemudian, dia menyinggung anggaran pendidikan pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pada anggaran tahun 2007 dan 2008. Ketika itu, anggaran pendidikan digugat di MK lantaran hanya 18 persen dan 15,6 persen yang semestinya 20 persen.

Kemudian, lanjut Dolfie, di

anggaran tahun 2022 anggaran Pendidikan juga terealisasi 15 persen, pada 2023 terealisasi 16 persen, dan pada 2024 terealisasi 17 persen. "2025 kalau by design karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan bisa dipastikan itu juga 17% tidak bergerak. Saat MK memutuskan APBN harus memenuhi 20% APBN, tidak bergerak," tambahnya.

Legislator PDIP ini menyebutkan anggaran pendidikan tak tercapai pada masa pemerintahan SBY hingga Jokowi. Dolfie khawatir akan ada anggapan postur tak berubah lantaran menteri keuangan adalah Sri Mulyani.

"Sudah dua kali pemerintahan SBY periode. Dua periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru harusnya berubah, jangan sampai kesimpulannya karena menteri keuangannya Ibu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini jadi nggak berubah, kesimpulannya jadi bisa begitu Bu," kata dia.

Ia menambahkan, jika sebagian dana pendidikan masih ditempatkan dalam pos cadangan di pembiayaan, maka itu berpotensi tidak direalisasikan.

"Ke depan, (mandatory spending) 20 persen ini harus dimasukkan semua dalam belanja. Tidak boleh ada dana yang sengaja ditaruh di cadangan dan tidak direalisasikan. Karena itu yang menyebabkan anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20 persen," ujar Dolfie dalam Raker tersebut.

Dolfie pun mengatakan, persoalan belum pernah mencapai 20 persen

dari APBN menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan fiskal agar anggaran pendidikan benar-benar terealisasi secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

**"Sudah dua kali pemerintahan SBY periode. Dua periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru harusnya berubah, jangan sampai kesimpulannya karena menteri keuangannya Ibu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini jadi nggak berubah, kesimpulannya jadi bisa begitu Bu,"**

**DOLFIE OTHNIEL  
FREDERIC PALIT**

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,

Menanggapi berbagai pertanyaan dari Dolfie tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa saat itu sudah September, anggaran pendidikan masih ada excess sehingga diberikan belanja tambahan. Namun tiga bulan tahun anggaran tersisa, Sri Mulyani mengatakan tidak akan bisa menghabiskan Rp80 triliun dalam waktu 3 bulan.

"Waktu itu kalau sudah mendekati September, kita belum mencapai 20%, maka diberikan lah KL itu belanja tambahan di bulan Oktober. Tiga bulan, Pak, Rp80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa, Pak? That's problem juga," ucap Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, maka dari itu kemudian dibentuklah dana abadi pendidikan. Ia juga mengatakan bahwa ditakutkan adalah memaksakan anggaran, "Supaya jangan sampai, oh karena harus 20%, harus habis. Nanti sekolah yang pagernya nggak rusak, diganti pagernya. Saya dengar waktu itu," katanya.

Dikutip dari kemendikdasmen, anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada APBN 2024. Anggaran itu terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke

Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Anggaran pendidikan sebesar itu meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp612,2 triliun.

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul tersebut, sepanjang tahun 2015 sampai 2023, pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total anggaran sebesar Rp3.212 triliun. Anggaran sebesar itu termasuk untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; dan peningkatan kualitas PAUD. Selain itu, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

Dengan anggaran tersebut, pemerintah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan menjadi Rp35,94 triliun pada 2024 dari Rp28,9 triliun pada 2023. Kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat memperluas akses pendidikan.

Beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah. Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik). (rls,ist/lut)



BUMN yang bergerak di bidang pengolahan nuklir, PT Industri Nuklir (Persero) atau Inuki. (Dok)

**Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki R Herry mengakui pihaknya tak lagi memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aset nuklir milik perusahaan. Walhasil, minta segera dilakukan penutupan.**

**S**atu-satunya BUMN yang bergerak dalam teknologi nuklir, PT Industri Nuklir Indonesia atau Inuki dalam kondisi sekarat. Hal ini menjadi dasar pengajuan pengalihan aset kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang saat ini disebut siap untuk mengambil alih pengelolaan aset tersebut.

"Sejak tahun 2022 kami tidak melakukan operasi. Margin Inuki itu 50 persen untuk support elemen bahan bakar nuklir kepada BRIN. Tapi sejak pesanan elemen dihentikan dan kami tidak bisa mengakses fasilitas, maka kami mengajukan penutupan," ujar Herry dikutip Selasa (22/7/2025).

Diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (21/7/2025), Herry menjelaskan proses pengalihan aset bermula saat BRIN mengajukan surat permohonan pada 17 Maret 2022 kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil alih aset Inuki guna dilakukan proses dekontaminasi.

Sejak Agustus 2022, akses Inuki ke fasilitas tersebut dihentikan dan perusahaan tak lagi menjalankan kegiatan operasional.

"Kami mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp114,5 miliar per audit 2024 dan kewajiban pihak ketiga sebesar Rp80,3 miliar. Resizing karyawan dilakukan, tersisa hanya lima orang tenaga kontrak. Inuki tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ketentuan

ketenagakerjaan," ujarnya.

Seiring dengan itu, sejumlah langkah telah dilakukan Inuki untuk menyelesaikan proses pengalihan aset, termasuk pembahasan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) internal dan holding, pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga konsultasi hukum dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Pada 22 April 2024, Kepala BRIN menyatakan kesediaan menerima hibah aset dari Inuki dengan menyertakan rincian mana aset yang akan dijadikan milik negara dan mana

# BUMN NUKLIR RI SEKARAT: KAMI MINTA PENUTUPAN

yang akan dimusnahkan.

"Surat Kepala BRIN itu menjadi dasar legal standing Kementerian BUMN untuk mengeluarkan keputusan para pemegang saham, agar aset Inuki diserahkan kepada BRIN," ujar Herry.

Ia menambahkan penyerahan aset sempat dijadwalkan pada 11 Oktober 2024, namun batal karena BRIN meminta revisi dokumen hibah.

Inuki kemudian mengajukan kembali draft hibah dan berita acara serah terima pada 26 Juni 2025, disertai dokumen pendukung seperti hasil review BPKP, laporan audit akuntan publik, dan legal opinion dari Jamdatun.

Herry menyebut ekuitas perusahaan telah negatif sebesar Rp80,27 miliar dengan total kewajiban mencapai Rp84 miliar.

"Saya sampaikan, Inuki sudah tidak memiliki kemampuan. Itu tercermin dari tidak adanya pendapatan, kerugian akumulatif, hingga cash flow operasi negatif Rp5,6 miliar. Maka, kami dorong percepatan serah terima aset," ucapnya.

Terkait kekhawatiran BRIN soal risiko hukum dalam penghapusbukuan aset yang berpotensi terkontaminasi, Herry mengutip pendapat hukum dari Jamdatun.

Dalam opini tersebut dijelaskan proses penghapusbukuan aset yang telah disahkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) BRIN tidak menimbulkan risiko hukum, baik secara administrasi negara maupun pidana.

"Legal opinion dari Jamdatun tanggal 13 Juni 2025 juga menegaskan pelibahan dan dekontaminasi dapat menggunakan anggaran internal BRIN. Itu sudah kami sampaikan pada 26 Juni," katanya lagi.

Menurut Herry, sebagian besar limbah radioaktif sudah ditangani sejak sebelum Inuki masuk Holding BUMN Farmasi pada 2022.

Berdasarkan data manifest, proses pelibahan telah dilakukan sejak 2009. Namun, Herry juga menyebutkan sebagian limbah di lokasi fasilitas berasal dari entitas lain. (wid, blo, cnbc/dya)

## BRIN: Negara Bisa Rugi Rp70 M

**KEPALA** Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengingatkan potensi kerugian negara hingga Rp70 miliar jika proses pengalihan aset limbah nuklir milik PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki tidak segera dilakukan.

Potensi kerugian itu berasal dari risiko yang timbul dari limbah radioaktif yang tak ditangani. Menurutnya, hal itu bisa menciptakan kondisi darurat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

"Potensi kerugian negara akibat biaya dekontaminasi dan pelibahan bisa mencapai Rp50-70 miliar, jauh melebihi nilai aset PT Inuki yang hanya sekitar Rp20 miliar," ujar Handoko membacakan surat BRIN kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) tertanggal 2 Juli 2025 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (21/7/2025).

Handoko menjelaskan BRIN telah menyuarkan urgensi penanganan limbah nuklir di dalam kawasan mereka sejak 2014. Namun, karena

status kepemilikan aset masih berada di tangan PT Inuki, BRIN tidak dapat melakukan intervensi secara langsung.

"Ini merupakan titik balik yang paling krusial dari apa yang selama ini sudah kami sampaikan sejak BRIN berdiri di 2021, bahwa limbah yang ada di PT Inuki harus segera diselesaikan karena berada di dalam halaman kami," ujarnya.

Menurut Handoko, aset yang akan dialihkan sebagian besar sudah tidak memiliki nilai manfaat karena bersifat limbah dan cacat produksi. Salah satunya adalah uranium dalam bentuk selang bahan bakar di Gedung 60 Kawasan Nuklir Serpong BRIN.

Aset itu diklaim bernilai Rp6,4 miliar. Akan tetapi, uranium itu tidak dapat digunakan kembali di reaktor milik BRIN karena sudah dirakit.

Karena kondisi ini, pengalihan tidak bisa menggunakan mekanisme hibah biasa yang mewajibkan penerima menunjukkan manfaat dari aset tersebut. Sebaliknya, BRIN kini menggunakan skema kedaruratan nuklir agar dapat mengambil alih pengelolaan tanpa

harus menyusun naskah urgensi pemanfaatan.

"Skema ini dipilih karena yang dibahas ini adalah sampah. Itu sebabnya saya harus menarik surat pernyataan kesediaan menerima hibah pada Oktober 2024," kata Handoko.

Proses hukum dan administrasi juga tengah ditempuh. BRIN telah bersurat kepada Jamdatun untuk memperoleh pendapat hukum (legal opinion), dan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai otoritas pengawas tenaga nuklir.

Bapeten pun telah membalas surat tersebut dan menyatakan bahwa situasi pengalihan aset sangat mendesak.

"Bapeten memandang sangat mendesak atau darurat untuk pengalihan atau hibah aset dari PT Inuki ke BRIN yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menghindari situasi yang membahayakan manusia dan lingkungan," bunyi kutipan surat Kepala Bapeten tertanggal 3 Juli 2025. (wid, rls, ant/dya)

## Dua Alasan Berbeda soal Jokowi Batal Diperiksa

# PENGACARA SEBUT SAKIT, AJUDAN BILANG ADA AGENDA LAIN

**Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), diketahui tidak menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7/2025) terkait isu tuduhan ijazah palsu yang ia laporkan. Dua alasan berbeda diungkapkan pihak Jokowi. Pengacara sebut sakit, sementara ajudan bilang ada agenda lain.**



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), di Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu, 20 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

**P**residen ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk menunda pemeriksaan terkait kasus tuduhan ijazah palsu karena sedang sakit. Jokowi sejatinya bakal menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai pelapor di Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7/2025).

Terkait hal ini, Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan permintaan penundaan pemeriksaan itu karena terkait dengan kondisi kesehatan kliennya. "Benar, minggu lalu kami sudah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya, tapi karena kondisi kesehatan Pak Jokowi yang tidak memungkinkan keluar kota, maka kami memohonkan penundaan pemeriksaan," ujar Rivai kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Dia menambahkan, kelanjutan pemeriksaan kliennya itu bisa terealisasi apabila telah mendapatkan persetujuan dokter atau Jokowi diperiksa di kediamannya langsung. Hanya saja, sejauh ini dua opsi itu masih belum dikonfirmasi oleh penyidik Subdit Kamneng Ditreskrim Polda Metro Jaya.

"Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban atas permohonan tersebut dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah mendapat jawabannya," pungkasnya.

Namun, ajudan Jokowi mengklarifikasi, pada hari itu Jokowi ada agenda yang tak bisa ditinggalkan di Solo.

"Ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga belum dapat melakukan kegiatan di luar Surakarta [Solo]," ujar Kopol Syarif, ajudan Jokowi, Selasa (22/7/2025).

Syarif mengatakan, saat ini Jokowi dalam kondisi sehat, meski masih dalam proses pemulihan. "Alhamdulillah beliau sehat walafiat, hanya saja masih dalam proses pemulihan," kata Syarif.

Selama ini, Jokowi dikatakan

menderita alergi kulit sepulang dari melayat Paus Fransiskus di Vatikan.

Syarif juga menegaskan bahwa hari itu Jokowi bukan mangkir dari panggilan penyidik. Tim pengacara, sudah bersurat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk meminta penundaan pemeriksaan.

"Dan perlu diketahui juga, tim kuasa hukum Pak Jokowi sudah

memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik dan agar dapat dilakukan penjadwalan ulang proses pemeriksaan," jelas Syarif.

"Jadi, tidak ada istilah Pak Jokowi mangkir didalam pemeriksaan. Justru beliau melalui kuasa hukum beliau sudah menyampaikan alasan beliau mengapa belum bisa hadir. Dan beliau

warga negara yang sangat patuh hukum," ungkap Syarif.

Syarif mengatakan, pihaknya belum mengetahui jadwal pemeriksaan ulang Jokowi.

"Sedang menunggu informasi lebih lanjut dari tim kuasa hukum Bapak Jokowi," jelas Syarif.

Kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang diadukan Jokowi pada 30 April saat ini sudah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Kasus itu ditangani oleh Subdit Kamneng Ditreskrim Polda Metro Jaya.

Meski demikian, Polda Metro Jaya telah memanggil sejumlah orang yang selama ini dikenal vokal menyoal ijazah Jokowi seperti dokter Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadhillah, dan Kurnia Tri Royani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. (wid,rls,kum/dya)

## Disindir karena Bisa Hadiri Kongres PSI

**MANTAN** Menpora Roy Suryo menyayangkan Jokowi tak memenuhi panggilan polisi. Padahal, Jokowi adalah pelapor.

JPMI mencatat pelaku kekerasan yMenurut dia, Jokowi mestinya mengutamakan pemanggilan yang dilayangkan oleh polisi dibanding menghadiri Kongres PSI — partai yang dipimpin Kaesang, anak bungsu Jokowi — di Solo pada Sabtu, 19 Juli 2025.

"Dia (Jokowi) katanya sakit, katanya, tapi hadir di salah satu kongres partai," kata Roy di Polda Metro Jaya, Senin (21/7/2025).

Sedangkan pada Kamis, 17 Juli — hari pemanggilan oleh Polda Metro Jaya — Jokowi menerima Plt Ketum PSI Andy Budiman di rumahnya di Solo. Budi memberikan jaket partai ke Jokowi.

Hal senada diungkapkan Tim Pembela Ulama dan Aktivistis (TPUA). Kuasa hukum TPUA, Ahmad Khozinudin menyatakan, dari informasi yang didapatnya ketidakhadiran Jokowi pada panggilan pemeriksaan karena alasan sakit.

"Sebenarnya sudah ada panggilan kepada Saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu. Tetapi Saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di re-schedule," ujar Khozinudin.

Namun, alasan itu dinilai sangat aneh. Sebab, ketika berdalih sakit, Presiden ke-7 RI itu justru hadir dalam pembukaan Kongres PSI di Solo pada 19 Juli.

"Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia," sebutnya.

Karenanya, penyidik diminta segera memeriksa Jokowi. Sebab, secara aturan penanganan suatu perkara haruslah pihak pelapor yang dimintai terangan terlebih dulu.

Jangan sampai, kata Khozinudin, kliennya atau pihak terduga terlapor yang diperiksa terlebih dulu. Sehingga, seolah-olah ada kejanggalan pada proses pemeriksaan.

"Jadi harus ya saudara Joko

### Pihak yang Dilaporkan dalam Perkara Isu Ijazah Palsu Jokowi

-  Roy Suryo
-  Rismon Sianipar
-  Tifauzia Tyassuma
-  Eggi Sudjana
-  Riza Fadillah
-  Kurnia Try Royani
-  Rustam Efendi
-  Mikhael Sinaga

Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba meriksain, manggil-manggilin klien kami. Sementara Saudara Joko Widodo belum diperiksa," katanya.

Diketahui, Jokowi mengajak Presiden Prabowo Subianto makan bakmi Jawa Bu Citro di Surakarta, pada Minggu malam, 20 Juli 2025. Momen tersebut terjadi usai Presiden Prabowo menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). (wid,rls,ant/dya)

# Ternyata 51% Aset Pemkot Malang Belum Kantongi Sertifikat

**MALANG** - Dari total 8.264 bidang aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, baru sekitar 49 persen bidang bersertifikat. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, menargetkan 200 bidang aset tersertifikasi sepanjang tahun 2025 ini.

"Ya, benar. Masih ada 51 persen yang belum tersertifikasi. Yang sudah tersertifikasi itu sekitar 4.000 an aset. Yang belum, ya sekitar 4.000 lebih. Kan dari total aset 8.264 bidang, dikurangi 4.000 an yang sudah itu. Tapi sekarang di 2025 ini juga berprogre," ujar Subkhan, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, upaya sertifikasi aset Pemkot Malang terus berjalan setiap tahun. Bahkan, hingga pertengahan 2025 ini, BKAD telah berhasil mensertifikasi hampir 140 bidang aset.

Subkhan menjelaskan, salah satu kendala utama dalam percepatan sertifikasi aset adalah banyaknya jumlah aset yang dimiliki Pemkot Malang. Jika dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kota Malang menempati urutan kedua terbanyak setelah Kota Surabaya.

"Dulu Kota Malang paling banyak

Tapi sekarang (aset) Pemkot Surabaya bertambah, jadi sekitar 8.500-an bidang. Kita di sekitar 8.264 bidang," jelasnya.

Dari total aset tersebut, pada 2019, menurut Subkhan, tercatat baru 971 bidang yang bersertifikat atau sekitar 11 persen dari total keseluruhan. Namun, progres sertifikasi meningkat signifikan dalam kurun 2020-2024, hingga kini mencapai sekitar lebih dari 4.000 bidang.

Selain jumlah yang banyak, menurutnya, proses sertifikasi aset pemerintah memang memerlukan waktu dan prosedur panjang. Subkhan menuturkan, ada dua instansi yang berperan penting dalam proses ini, yakni BKAD sebagai pemohon dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penerbit sertifikat.

"Dari BKAD, kami siapkan semua persyaratan administrasi. Setelah itu baru diajukan ke BPN, dan di sana pun masih ada tahapan-tahapan lagi," katanya.

Salah satu tahapan yang memerlukan waktu adalah proses pengukuran bidang aset. Dikatakannya, pengukuran dilakukan dua kali, yakni pertama oleh juru ukur BKAD, lalu

diukur ulang oleh petugas BPN setelah pendaftaran diterima.

"Kalau itu sudah selesai, barulah terbit Surat Keputusan, dan kemudian sertifikat. Jadi memang tidak bisa satu atau dua bulan langsung selesai," kata Subkhan.

Menurutnya, sertifikasi aset tak hanya soal administrasi, tetapi juga memerlukan kehati-hatian tinggi. Sebab, ada risiko bila aset yang didaftarkan ternyata berstatus hak milik pihak lain atau sedang dalam sengketa.

Di sisi lain, Subkhan juga mengakui, jika sertifikasi tidak segera dilakukan, ada potensi munculnya masalah di kemudian hari, seperti klaim kepemilikan oleh pihak lain hingga sengketa lahan. Karena itu, pengamanan aset dengan mencatat di neraca dan segera mengurus sertifikasi menjadi langkah penting.



(Ilustrasi) Salah satu aset milik Pemkot Malang di wilayah Kecamatan Kedungkandang. (Santi/Lentera)

"Kita amankan dulu, pastikan tercatat di neraca. Baru kemudian dilengkapi bukti kepemilikan, lalu kita ajukan sertifikasi," terangnya.

Subkhan memastikan, BKAD akan terus berkoordinasi dengan BPN agar proses sertifikasi berjalan sesuai target. Ditegaskannya, percepatan sertifikasi aset menjadi bagian dari komitmen Pemkot Malang dalam menjaga dan mengelola aset daerah dengan akuntabel. (Santi/Dya)

## Semua Lapak Pasar Among Tani Belum Miliki SIHP, DPRD Bakal Panggil Diskumperindag



Ilustrasi) Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. (Santi/Lentera)

**BATU** - DPRD Kota Batu bakal memanggil Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu. Hal ini dilakukan untuk meminta penjelasan terkait belum adanya Surat Izin Hak Pakai (SIHP) untuk semua lapak di Pasar Induk Among Tani.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, menyampaikan, belum

terbitnya SIHP berpotensi memunculkan masalah hukum di kemudian hari. Ia menyebut, tanpa SIHP, keberadaan para pedagang di pasar menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah.

"SIHP ini sangat penting bagi kelangsungan aktivitas jual beli pedagang di pasar. Tanpa SIHP, secara hukum status mereka menjadi ilegal. Artinya, terjadi praktik sewa-menyewa kios tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Punjul, dikutip pada Selasa (22/7/2025).

Berdasarkan data yang dimiliki DPRD Kota Batu, Punjul menyebutkan, dari total 277 lapak di Pasar Sayur, baru 44 lapak yang sudah diserahkan dan disertai dengan SIHP.

Sedangkan di Pasar Induk Among Tani, yang diresmikan sebagai pasar modern percontohan, menurutnya justru belum ada satu pun lapak atau kios yang dilengkapi SIHP.

Punjul menilai, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Ia mendorong Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumperindag) sebagai pihak yang berwenang, untuk segera mempercepat proses penerbitan SIHP.

"Diskumperindag harus proaktif, duduk bersama UPT Pasar dan para pedagang. Jangan sampai menunggu persoalan menjadi semakin besar," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk memastikan tindak lanjut, DPRD melalui Badan Musyawarah (Banmus) akan melakukan agenda rapat kerja dengan Komisi B. Agenda tersebut direncanakan memanggil pihak Diskumperindag guna meminta penjelasan resmi terkait perkembangan penerbitan SIHP, khususnya di Pasar Induk Among Tani dan Pasar Sayur.

Punjul juga mengungkapkan, saat ini banyak pedagang masih menggunakan surat-surat lama yang diterbitkan ketika Kota Batu masih menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Kondisi ini dinilainya menimbulkan kerancuan terkait legalitas penggunaan kios hingga

saat ini.

"Surat-surat lama itu masih dipakai, padahal status hukum Kota Batu sudah berbeda. Ini yang menimbulkan persoalan di lapangan," katanya.

Punjul juga menyampaikan, belum adanya SIHP di Pasar Induk Among Tani menjadi catatan penting. Mengingat pasar tersebut dibangun dengan investasi besar dan diperuntukkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Hingga kini, belum ada satu pun kios di pasar itu yang terdaftar resmi melalui SIHP. "Pasar Among Tani adalah proyek besar dengan nilai aset yang signifikan. Tapi sampai hari ini belum satu pun kios memiliki SIHP. Kalau terus dibiarkan, akan makin sulit mengontrol dan mencegah penyalahgunaan. Ini sudah jadi sorotan banyak pihak," ungkapnya.

Punjul juga menyinggung persoalan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu terkait adanya praktik penyewaan kios di Pasar Induk Among Tani yang tidak melalui mekanisme resmi. (Santi/Dya)



Petugas pemadam kebakaran memeriksa puing-puing pesawat latih Angkatan Udara Bangladesh yang jatuh di kampus sekolah di Dhaka, Bangladesh, Senin (21/7/2025). (Foto: AP)

# PESAWAT MILITER BANGLADESH HANTAM SEKOLAH, PULUHAN SISWA TEWAS

**Jumlah korban tewas akibat jatuhnya pesawat latih milik Angkatan Udara Bangladesh yang menimpa sebuah gedung sekolah di Dhaka kini meningkat menjadi sedikitnya 27 orang. Mayoritas korban adalah siswa sekolah tersebut, termasuk pilot pesawat yang juga dinyatakan meninggal dunia.**

**D**ikutip dari Associated Press dan Reuters, Selasa (22/7/2025), kecelakaan itu melibatkan sebuah pesawat latih militer jenis F-7 BGI buatan China yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Bangladesh.

Kecelakaan itu memicu kebakaran hebat yang menghancurkan gedung dua lantai milik sebuah sekolah bernama Milestone School and College di Dhaka. Sekolah itu terletak di area padat penduduk di wilayah Utara, yang berjarak 11 kilometer dari Pangkalan Udara AK Khandaker.

Sebagian besar korban tewas dan terluka adalah anak-anak kecil telah memperparah tragedi yang mengguncang negara berpenduduk 171 juta orang itu dan membuat negara itu dilanda duka nasional.

Saat polisi dan personel angkatan udara bekerja di lokasi kejadian untuk mengevakuasi bagian-bagian pesawat yang jatuh pada hari Selasa, massa yang berkumpul mulai meneriaki petugas, sementara beberapa mahasiswa mengatakan kepada CNN bahwa mereka yakin jumlah korban tewas mungkin lebih tinggi daripada yang dirilis secara resmi.

Pemerintah membantah menyembunyikan informasi mengenai korban kecelakaan, lapor media pemerintah BSS News, mengutip divisi pers Penasihat Utama. BSS News menambahkan bahwa identitas korban tewas masih dalam proses verifikasi.

Di lokasi kecelakaan pada hari Selasa, para saksi masih tampak terguncang oleh kengerian yang mereka saksikan sehari sebelumnya.

"Kami melihat potongan-potongan tubuh yang berserakan, milik anak-anak, dan wali," ujar Mohammad Imran Hussein, dosen jurusan Bahasa Inggris di sekolah tersebut, kepada CNN.

"Saya tidak dapat mengungkapkan semuanya dengan kata-kata," katanya, tertekan secara emosional dan kesulitan berbicara.

Hussein mengatakan dia berada di gedung sekolah di seberang taman bermain ketika jet itu jatuh.

"Suaranya sungguh tak tertahankan. Dan saya melihat sekeliling untuk melihat apa yang terjadi, saya melihat ekor pesawat.

Saya melihat kobaran api yang besar," ujarnya.

Milestone College memiliki taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah atas di kampusnya. Bangunan yang hancur dalam kecelakaan itu merupakan salah satu dari sekitar 20 bangunan yang menampung hampir 100 siswa berusia antara enam dan 13 tahun, kata Hussein.

"Gedung ini seperti diubah menjadi jebakan maut. Mengerikan, benar-benar mengerikan," kata Sheik Rameen, 21 tahun, seorang siswa SMA.

"Saya melihat banyak anak, saya mencoba menyelamatkan nyawa mereka," ujarnya kepada CNN di lokasi kejadian. "Saya melihat seorang anak yang terbakar mencari pertolongan, tetapi tidak ada yang datang menolong."

Jet FT-7 sedang menjalani misi

latihan rutin ketika jatuh segera setelah lepas landas sekitar pukul 1:18 siang waktu setempat pada hari Senin (3:18 pagi EST) setelah terjadi kerusakan mekanis, menurut BSS News, mengutip angkatan bersenjata negaranya itu.

Pilot pesawat tersebut, yang bernama Letnan Penerbang Towkir Islam, telah melakukan "segala upaya untuk mengalihkan pesawat dari daerah yang padat penduduk menuju lokasi yang jarang penduduknya," kata militer.

F-7 BGI adalah varian terakhir dan tercanggih dalam keluarga pesawat Chengdu J-7/F-7 Tiongkok, menurut Jane's Information Group. Reuters melaporkan bahwa Bangladesh menandatangani kontrak untuk 16 pesawat pada tahun 2011 dan pengirimannya selesai pada tahun 2013. (AP, Reuters, CNN, BSS News, ist/nei)

## Tragedi Ungkap Lemahnya Pertahanan Udara



Pesawat latih militer Bangladesh menabrak gedung sekolah di ibu kota Dhaka (Foto: Reuters)

memiliki sistem pertahanan udara yang memadai, terutama dalam menghadapi ancaman dari jet tempur, rudal jarak jauh, hingga drone siluman.

Letak geografis Bangladesh yang strategis di utara Teluk Benggala dan berbatasan langsung dengan Myanmar menempatkan negara ini dalam titik rawan geopolitik antara kekuatan regional India dan Tiongkok. Sayangnya, sistem pertahanan udara Bangladesh masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negarane-neara tetangganya.

Diketahui sistem rudal jarak pendek FM-90 buatan Tiongkok, yang diakuisisi pada 2011, hingga kini masih menjadi andalan pertahanan darat Bangladesh. Walau efektif melawan helikopter dan drone, sistem ini dianggap tidak mampu menghadapi jet tempur modern atau rudal jelajah berkecepatan tinggi.

"Meskipun sistem pertahanan udara kita tidak sepenuhnya nol, itu hampir nol," kata Purnawirawan Mayor Jenderal Fazle Elahi Akbar seperti dikutip Bonik Barta, Selasa (22/7/2025).

"Teknologi yang kita gunakan sudah tertinggal jauh dari standar militer saat ini. Jika ada serangan besar-besaran, sistem kita tidak akan lebih kuat dari jaring laba-laba," tambahnya. Menurutnya, selama 16 tahun terakhir perhatian pemerintah justru lebih banyak pada citra kekuatan militer daripada pembangunan nyata.

"Diplomasi tanpa pencegahan adalah nol. Begitu Anda punya kekuatan militer, dunia akan lebih menghargai Anda," tegasnya.

Data militer menunjukkan Angkatan Udara Bangladesh mengoperasikan 44 pesawat tempur, sebagian besar merupakan varian lama seperti F-7 buatan Tiongkok dan MiG-29 era Soviet. Selain itu, terdapat 73 helikopter dan sejumlah pesawat latih Yak-130 yang juga digunakan untuk serangan ringan. (The Economic Times, Bonik Barta, ist/nei)

# Benarkah Permen Karet Bisa Redakan Asam Lambung? Ini Faktanya!

**N**aiknya asam lambung, yang dikenal sebagai Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), merupakan kondisi ketika cairan asam dari lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Situasi ini kerap menimbulkan rasa panas atau terbakar di area dada yang terasa sangat mengganggu.

Kondisi ini terjadi ketika sfingter esofagus bagian bawah, otot pembatas kerongkongan dan lambung, melemah atau tidak berfungsi optimal. Berbagai faktor pemicu dapat memperburuk kondisi ini, mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berikut ini cara efektif mengatasi asam lambung, mulai dari perubahan gaya hidup dan pola makan, hingga berbagai pengobatan alami yang dapat dicoba.

## Penyebab Asam Lambung Naik

Asam lambung naik terjadi ketika sfingter esofagus bagian bawah, yaitu otot pembatas antara kerongkongan dan lambung, melemah. Kondisi ini memungkinkan asam lambung kembali naik ke esofagus, menimbulkan rasa tidak nyaman.

Beberapa makanan dan minuman tertentu dapat memicu atau memperburuk kondisi ini. Makanan tinggi lemak, pedas, asam, dan berkarbonasi, seperti gorengan, keju, buah-buahan asam, cokelat, serta minuman berkafein dan beralkohol, adalah pemicu umum.

Selain itu, kebiasaan makan yang buruk juga berperan besar. Makan terlalu banyak, terlalu cepat, atau langsung berbaring setelah makan dapat meningkatkan tekanan di perut. Berat badan berlebih, merokok, dan stres juga dapat memicu peningkatan asam lambung.

Faktor lain yang tidak kalah penting meliputi penggunaan obat-obatan tertentu, kondisi hernia hiatus di mana sebagian lambung masuk rongga dada, serta faktor usia yang membuat otot sfingter esofagus bawah melemah seiring waktu.

## Strategi Efektif

Mengatasi asam lambung memerlukan perubahan gaya hidup yang konsisten. Mulailah dengan makan dalam porsi kecil namun lebih sering, sekitar 4-5 kali sehari, untuk meringankan kerja

lambung. Hindari berbaring setelah makan; berikan jeda minimal 2-3 jam sebelum tidur.

Sesuaikan posisi tidur Anda dengan meninggikan kepala dan dada sekitar 15-20 cm menggunakan bantal tambahan atau ganjalan di bawah kasur. Tidur miring ke kiri juga dapat membantu pencernaan dan membatasi refluks asam. Jaga berat badan ideal, karena obesitas dapat menambah tekanan pada perut.

Menghentikan kebiasaan merokok sangat penting, sebab nikotin dapat melemahkan katup esofagus. Hindari aktivitas berat atau membungkuk setelah makan, cukup berjalan kaki sejenak. Kelola stres dengan meditasi atau pola tidur teratur, karena stres dapat meningkatkan produksi asam lambung.

Kenakan pakaian longgar untuk menghindari tekanan pada perut. Mengunyah makanan lebih lama membantu lambung mencerna lebih ringan. Fakta uniknyanya, mengunyah permen karet tanpa gula setelah makan dapat merangsang produksi air liur yang membantu menetralkan asam lambung. Saat asam lambung naik, segera tegakkan posisi tubuh.

## Pola Makan Tepat dan Pengobatan Alami

Perubahan pola makan adalah kunci penting dalam cara atasi asam lambung. Hindari makanan pemicu seperti makanan pedas, berlemak, dan digoreng yang dapat mengiritasi lambung dan melemahkan sfingter esofagus. Buah-buahan asam, cokelat, minuman berkafein, beralkohol, dan bersoda juga perlu dihindari.

Pilih makanan yang aman dan ramah lambung seperti sayuran hijau (bayam, kangkung, brokoli), buah rendah asam (melon, pisang, pepaya, alpukat), serta lemak sehat tak jenuh. Susu rendah lemak juga dapat membantu menetralkan asam lambung dan meredakan gejala.

Beberapa pengobatan alami juga dapat membantu meredakan gejala asam lambung. Minum air hangat, jahe, madu, atau kunyit yang bersifat antiinflamasi dapat menyamankan tenggorokan dan meredakan nyeri ulu hati. Teh chamomile juga efektif untuk menetralkan asam lambung dan mengurangi stres.

Jika gejala tidak membaik dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan alami, penggunaan obat asam lambung yang dijual bebas seperti antasida dapat membantu. Namun, jika kondisi sering kambuh atau tidak kunjung membaik, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang lebih tepat.

## Manfaat Permen Karet

Meski sudah menghindari hal-hal yang bikin gangguan sistem pencernaan kambuh, terkadang masih saja asam lambung naik dan mengganggu aktivitas seharian. Asam lambung naik bisa menimbulkan sakit maag hingga gastroesophageal reflux disease (GERD). Kedua kondisi ini dapat menimbulkan sensasi panas dan terbakar.

Anda mungkin merasakan asam lambung mulai naik dari perut, lalu ke dada bagian tengah hingga ke tenggorokan. Bahkan, hal ini juga bisa menyebabkan rasa asam atau pahit pada mulut Anda.

Sebuah penelitian dalam Journal of Dental Research menyarankan untuk mengunyah permen karet bebas gula selama 30 menit setelah makan untuk mencegah gejala asam lambung naik. Penelitian yang dilakukan oleh Rebecca Moazzez dan tim yang berasal dari London ini menyatakan bahwa mengunyah permen karet bisa meningkatkan produksi air liur.

## Jenis Permen Karet

Terdapat berbagai jenis permen karet yang tersedia di pasaran. Namun, tidak semuanya memiliki manfaat yang sama dalam pencegahan asam lambung naik.

Dokter dan para ahli menganjurkan jenis permen karet dengan kandungan bikarbonat atau permen karet tanpa gula untuk mengatasi gangguan asam lambung.

Sebuah studi dari Wake Forest University melakukan pengujian pada 40 pasien penderita refluks asam lambung dengan pemberian permen karet bikarbonat tanpa gula dan permen karet tanpa gula biasa.

Hasilnya, mengunyah kedua jenis permen karet ini efektif untuk meningkatkan produksi dan membuat air liur lebih basa. (ne,ist/dya)



# Jutaan Orang Sulit Tidur, Galaxy Watch 8 Hadirkan Solusi Baru

**S**amsung Electronics Indonesia secara resmi memperkenalkan lini perangkat wearable terbarunya, Galaxy Watch8 Series, dalam ajang Galaxy Unpacked terbaru.

Potensi kerugian itu berasal dari risiko yang timbul dari limbah radioaktif yang tak ditangani. Menurutnya, hal itu bisa menciptakan kondisi darurat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

"Potensi kerugian negara akibat biaya dekontaminasi dan pelimbanan bisa mencapai Rp50-70 miliar, jauh melebihi nilai aset PT Inuki yang hanya sekitar Rp20 miliar," ujar Handoko membacakan surat BRIN kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) tertanggal 2 Juli 2025 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (21/7/2025).

Handoko menjelaskan BRIN telah menyuarakan

urgensi penanganan limbah nuklir di dalam kawasan mereka sejak 2014. Namun, karena status kepemilikan aset masih berada di tangan PT Inuki, BRIN tidak dapat melakukan intervensi secara langsung.

"Ini merupakan titik balik yang paling krusial dari apa yang selama ini sudah kami sampaikan sejak BRIN berdiri di 2021, bahwa limbah yang ada di PT Inuki harus segera diselesaikan karena berada di dalam halaman kami," ujarnya.

Menurut Handoko, aset yang akan dialihkan sebagian besar sudah tidak memiliki nilai manfaat karena bersifat limbah dan cacat produksi. Salah satunya adalah uranium dalam bentuk selang bahan bakar di Gedung 60 Kawasan Nuklir Serpong BRIN.

Aset itu diklaim bernilai Rp6,4 miliar. Akan tetapi, uranium itu tidak dapat digunakan kembali di reaktor milik BRIN karena sudah dirakit.

Karena kondisi ini, pengalihan

tidak bisa menggunakan mekanisme hibah biasa yang mewajibkan penerima menunjukkan manfaat dari aset tersebut. Sebaliknya, BRIN kini menggunakan skema kedaruratan nuklir agar dapat mengambil alih pengelolaan tanpa harus menyusun naskah urgensi pemanfaatan.

"Skema ini dipilih karena yang dibahas ini adalah sampah. Itu sebabnya saya harus menarik surat pernyataan kesediaan menerima hibah pada Oktober 2024," kata Handoko

Proses hukum dan administrasi juga tengah ditempuh. BRIN telah bersurat kepada Jamdatun untuk memperoleh pendapat hukum (legal opinion), dan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai otoritas pengawas tenaga nuklir.

Bapeten pun telah membalas surat tersebut dan menyatakan bahwa situasi pengalihan aset sangat mendesak.

"Bapeten memandang sangat mendesak atau darurat untuk pengalihan atau hibah aset dari PT Inuki ke BRIN yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menghindari situasi yang membahayakan manusia dan lingkungan," bunyi kutipan surat Kepala Bapeten tertanggal 3 Juli 2025.

Saat ini, BRIN tengah menyiapkan proses verifikasi ulang

dan valuasi aset secara menyeluruh bersama Bapeten, terutama atas aset yang berada di Gedung 60. Proses ini diperlukan sebelum dilakukan penandatanganan berita acara dan pencatatan aset ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Kami harus masuk bersama-sama ke dalam Gedung 60 untuk melihat langsung. Hampir semua barang di situ pasti sudah tidak bernilai, tapi tetap harus dilakukan stock opname bersama Bapeten," ujar Handoko.

Fasilitas pengolahan nuklir di Science Techno Park Habibie, Serpong, Tangerang Selatan, Banten menjadi sengketa antara BRIN dengan BUMN PT Inuki (Persero). Aset itu disebut memiliki nilai Rp20,9 miliar.

Sengketa bermula pada Maret 2022 saat BRIN mengajukan pengambilalihan aset Inuki ke BUMN. Pengambilalihan aset melalui mekanisme hibah sudah disetujui melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Pada bulan berikutnya, BRIN mengirim surat bersedia menerima hibah, lengkap dengan kesediaan menanggung biaya dekontaminasi Rp70 miliar. Namun, BRIN kemudian membatalkan penerimaan hibah setelah konsultasi dengan Kementerian Keuangan.

"Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan itu melihat ada potensi kerugian negara apabila ini dilanjutkan. Karena untuk melakukan proses pengolahan limbah sekaligus bekontaminasi, BRIN setidaknya maksimal harus mengeluarkan Rp70 miliar, minimal Rp40 miliar sehingga ada ketidaksesuaian (dengan nilai hibah)," ucap Handoko pada rapat sebelumnya dengan DPR. (wid,rls,ant/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
**PIMPINAN PERUSAHAAN** TARMUJI TALMACSI  
**OMBUDSMAN** SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
**PENANGGUNG JAWAB** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**PIMPINAN REDAKSI** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**REDAKTUR PELAKSANA** AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
**REDAKTUR** LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

**MEDIA TERVERIFIKASI**

# Crop Top Batik Lengan Panjang, Gaya Etnik Anak Kekinian

**T**ren fashion batik kini semakin variatif dengan sentuhan modern yang cocok untuk anak muda, salah satunya lewat model outer crop top ber lengan panjang. Potongan yang ringkas dan modis ini berpadu apik dengan motif batik tradisional Indonesia, menghasilkan gaya yang kekinian tanpa meninggalkan nilai budaya. Bagi kamu yang berusia 20-an dan ingin tampil standout, outer batik ini bisa jadi andalan untuk berbagai kesempatan, dari hangout santai hingga acara semi-formal.

Siluet crop yang memberikan kesan jenjang dan lengan panjang yang anggun membuat item ini mampu menghadirkan gaya kontemporer yang modis dan serbaguna. Cukup padukan dengan celana high-waist, rok midi, atau dress polos, kamu sudah bisa tampil maksimal tanpa terkesan kaku. Dalam artikel ini, kami akan mempersembahkan delapan model outer crop top batik lengan panjang yang sangat cocok untuk kamu yang ingin tampil lebih stylish di usia 20-an.

## Lengan Balon

Outer crop batik dengan lengan balon merupakan pilihan ideal bagi kamu yang ingin tampil anggun sekaligus mencolok. Lengan balon yang mengembang dari bahu hingga pergelangan tangan memberikan kesan siluet yang dramatis, namun tetap terasa ringan dan nyaman saat dikenakan.

Potongan crop yang sejajar dengan pinggang menciptakan ilusi tubuh yang lebih jenjang dan proporsional. Saat dipadukan dengan motif batik klasik seperti parang atau truntum, outer ini menghadirkan sentuhan etnik yang tetap modern. Sangat cocok untuk berbagai acara semi-formal, ngopi bersama teman, atau kegiatan di kampus.

Dengan memadukan outer ini bersama celana kulot atau jeans high-waist, kamu akan tampil stylish tanpa perlu repot. Jadi, jika kamu ingin menonjolkan gaya sekaligus menjaga kesan tradisional, outer crop batik ini adalah pilihan yang tepat untukmu.

## Siluet Kotak

Desain siluet kotak atau boxy menciptakan nuansa kasual yang tetap stylish, terutama ketika dipadukan dengan motif batik modern. Outer crop ini memiliki potongan yang longgar di bagian tubuh, sehingga memberikan kenyamanan dan kebebasan bergerak yang lebih. Sangat ideal bagi mereka yang menyukai gaya berpakaian sederhana namun tetap memiliki elemen fashion yang menarik. Dengan pilihan warna earthy tone atau pastel yang lembut, model ini dapat berfungsi sebagai item utama atau sebagai lapisan luar untuk inner polos.

## Detail Kancing Depan

Outer model kancing depan menawarkan kemudahan dalam pemakaian, karena dapat berfungsi sebagai atasan maupun lapisan luar. Dengan potongan ramping yang menonjolkan bagian pinggang, outer ini berhasil menciptakan siluet tubuh yang menarik, sementara detail kancingnya memberikan nuansa retro yang tetap modern.

Seringkali outer ini dipadukan dengan motif batik kawung kecil atau desain geometris untuk menjaga kesan yang sederhana.

Untuk menciptakan tampilan feminin, kamu dapat memadukannya dengan rok span, atau jika ingin lebih formal, celana kain dengan potongan lurus adalah pilihan yang tepat.

Jika kamu lebih memilih gaya santai, mengenakannya terbuka dengan tanktop dan jeans juga sangat sesuai. Outer ini sangat versatile, sehingga bisa dikenakan baik untuk

acara siang maupun malam karena pilihan warnanya yang fleksibel dan mudah disesuaikan.

## Model Kimono

Model ini menggabungkan siluet crop dengan potongan lengan lebar yang terinspirasi dari kimono, menciptakan kesan yang eksotis sekaligus modern.

Biasanya, outer ini dilengkapi dengan tali atau sabuk yang dapat disesuaikan, sehingga memberikan kenyamanan sekaligus tampilan yang santai.

Motif batik yang dipilih sering kali memiliki nuansa floral atau desain abstrak, dengan kombinasi warna yang bold dan menarik perhatian. Model kimono crop ini sangat ideal untuk dijadikan outfit utama dalam acara semi-formal maupun saat bersantai dengan gaya artsy.

## Asimetris

Bagi kamu yang ingin tampil dengan cara yang berbeda, model crop batik asimetris menjadi pilihan yang menarik dengan siluet yang unik dan eksentrik.

Dengan potongan yang pendek di bagian depan dan sedikit lebih panjang di belakang, busana ini menciptakan kesan yang modern dan edgy. Apalagi jika dipadukan dengan motif batik modern seperti "mega mendung" atau batik lukis kontemporer, penampilanmu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Model ini sangat cocok untuk berbagai acara kreatif, seperti pameran, bazar, atau konser(nei,ist/dya)



**Harapan pada (dari Hal 1) ...**

**D**alam acara Penyerahan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/07/2025), itu Bahlil mentatakan ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra FS-nya Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar US\$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun. Nilai investasi tersebut di luar ekosistem baterai mobil khusus yang akan dibangun sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyebut, 18 proyek ini terdiri dari delapan proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, dua proyek tentang transisi energi, dua proyek ketahanan energi, tiga proyek hilirisasi pertanian, serta tiga proyek hilirisasi kelautan dan perikanan.

"Kami dalam berbagai kajian para FS ini sudah melewati sebuah proses-proses panjang. Dari diskusi, kajian mendalam, antar tim, melibatkan akademisi, melibatkan pemangku kepentingan lain, pengusahanya kita undang, teknologinya kita undang," katanya.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam berbagai kajian pra FS ini, pihaknya sudah melewati sebuah proses yang cukup panjang. Mulai dari diskusi, kajian mendalam antar tim yang melibatkan akademisi, dan melibatkan para pelaku usaha.

"Jadi ini sudah lewat, dan kita turun ke lapangan Pak Kepala Danantara, jadi tim satgas kita turun ke lapangan. Jadi memang ini belum sempurna, namanya saja pra-FS," katanya.

Oleh sebab itu, ia pun optimistis di tangan Danantara, sejumlah proyek tersebut akan berjalan lancar. Terlebih, menurutnya Danantara mempunyai kekuatan dari sisi pendanaan.

Satgas Hilirisasi, sambung Bahlil, selalu siap untuk terus berkoordinasi dengan Danantara, membahas lebih lanjut terkait penentuan skema pembiayaan, penentuan modal bisnis, pelaksanaan proyek, penetapan lokasi, ataupun penyelesaian kendala proyek yang di dalamnya termasuk perizinan lahan dan mitigasi sosial lingkungan.

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari 18 proyek ini, proyek hilirisasi minerba menjadi yang terbesar dengan 8 proyek senilai US\$ 20,1 miliar dan potensi menyerap 104.974 tenaga kerja.

Kemudian, proyek di sektor pertanian senilai US\$ 444,3 juta dan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 23.950. Lalu, proyek hilirisasi kelautan dan perikanan senilai US\$ 1,08 miliar dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 67.100.

Berikutnya, proyek transisi energi senilai US\$ 2,5 miliar dan potensi menyerap 29.652 tenaga kerja. Selanjutnya di sektor ketahanan energi senilai US\$ 14,5 miliar dengan potensi penyerapan 50.960 tenaga kerja.

Bahlil mengatakan selain

menciptakan potensi ratusan ribu lapangan pekerjaan baru. lapangan pekerjaan. Proyek hilirisasi juga akan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. "Itu (proyek hilirisasi) akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak. Bukan lagi upah, mohon maaf, bukan lagi upah UMR (Upah Minimum Regional). Dan ini sebagai instrumen penetrasi dalam rangka memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan," tegasnya.

Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. "Itu (proyek hilirisasi) akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak," ucap Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa upah yang akan diterima bukan lagi upah upah minimum regional (UMR). Ia menilai hal tersebut merupakan instrumen penetrasi dalam rangka memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa kontribusi investasi di bidang hilirisasi meningkat cukup signifikan. "Kurang lebih dari investasi yang masuk di kloter kedua atau kalau dalam satu semester, itu kurang lebih kontribusinya dari Rp950triliun lebih itu mencapai 30%, itu berdasarkan dari hilirisasi," tandasnya.

Rosan juga menyebutkan selama empat bulan Danantara diluncurkan, telah mendapatkan pendanaan melalui kerja sama dengan Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund) lain sebesar USD7 miliar.

"Dari USD7 miliar itu dengan Qatar USD4 miliar, kemudian dengan CIC (China Investment Corporation) USD2 juta dan juga kemudian dengan RDIF (Russian Direct Investment Fund). Dan kita sedang ada pembicaraan dengan Sovereign Wealth Fund lainnya untuk bersama-sama untuk berinvestasi terutama di Indonesia," pungkash Rosan.

Satgas Hilirisasi, sambung Bahlil, selalu siap untuk terus berkoordinasi dengan Danantara, membahas lebih lanjut terkait penentuan skema pembiayaan, penentuan modal bisnis, pelaksanaan proyek, penetapan lokasi, ataupun penyelesaian kendala proyek yang di dalamnya termasuk perizinan lahan dan mitigasi sosial lingkungan.

Proyek hilirisasi mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi industri tambang nasional, termasuk nikel, sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian ekonomi dan ketahanan energi nasional.

Namun demikian, Meitri menekankan bahwa hilirisasi harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, terutama di wilayah sensitif seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Indonesia harus bisa maju secara industri tanpa mengorbankan alamnya sendiri. Kebijakan hilirisasi

Presiden Prabowo patut didukung, dengan catatan lingkungan harus dijaga dan masyarakat lokal harus dilindungi serta dilibatkan," tegas Meitri.

Raja Ampat, yang dikenal dunia karena kekayaan biodiversitas lautnya, kini terancam oleh aktivitas tambang nikel di sejumlah pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran. Investigasi terbaru Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan adanya kerusakan hutan tropis, sedimentasi laut, dan potensi degradasi ekosistem pesisir akibat aktivitas perusahaan tambang.

Meitri yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup DPR RI ini menyebut aktivitas tambang tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memprioritaskan konservasi, perikanan, dan pariwisata bahari di pulau kecil, bukan pertambangan. Juga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban AMDAL dan pelarangan pencemaran lingkungan.

"Selain itu, aktivitas tambang di pulau kecil juga diduga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang secara tegas melarang praktik pertambangan di pulau kecil karena bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem," ungkap Meitri.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berkompromi dengan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, apalagi di kawasan yang secara hukum wajib dilindungi.

"Keberanian Presiden Prabowo untuk menghentikan aktivitas tambang yang terbukti mencemari lingkungan dan merugikan komunitas lokal patut didukung sebagai wujud keberpihakan terhadap masa depan bumi Indonesia," ujarnya.

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, hilirisasi merupakan langkah strategis yang bermanfaat dalam meningkatkan nilai tambah nasional, terutama di sektor nikel yang vital bagi industri baterai dan kendaraan listrik. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan keberlanjutan dan keadilan ekologis.

"Hilirisasi harus dijalankan secara partisipatif, transparan, dan berdasarkan pemetaan ekologis yang akurat. Aspek-aspek ini harus menjadi perhatian utama pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Meitri menyerukan agar pemerintah memastikan penegakan hukum secara konsisten terhadap perusahaan tambang yang terbukti melanggar izin dan mencemari lingkungan, mengevaluasi seluruh izin pertambangan di wilayah konservasi, serta melaksanakan praktik baik yang melibatkan masyarakat lokal dan lembaga adat dalam setiap keputusan yang berdampak pada

ruang hidup mereka.

"Hilirisasi adalah jalan untuk mensejahterakan rakyat, bukan melukai alam. Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menjaga warisan lingkungan hidup bagi generasi mendatang," pungkash Meitri. (rls,ist/lut)

**18 PROYEK STRATEGIS INDUSTRI DAN HILIRISASI DI INDONESIA**

- Smelter Aluminium (Bauksit) – Mempawah, Kalimantan Barat  
Investasi Rp60 triliun, tenaga kerja 14.700 orang
- Industri DME (Batu Bara) – 6 lokasi (Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin)  
Investasi Rp164 triliun, tenaga kerja 34.800 orang
- Aspal Buton – Buton, Sulawesi Tenggara  
Investasi Rp1,49 triliun, tenaga kerja 3.450 orang
- Mangan Sulfat – Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Investasi Rp3,05 triliun, tenaga kerja 5.224 orang
- Stainless Steel (Nikel) – Morowali, Sulawesi Tengah  
Investasi Rp38,4 triliun, tenaga kerja 12.000 orang
- Copper Rod, Wire & Tube (Tembaga) – Gresik, Jawa Timur  
Investasi Rp19,2 triliun, tenaga kerja 9.700 orang
- Besi Baja (Pasir Besi) – Sarmi, Papua  
Investasi Rp19 triliun, tenaga kerja 18.000 orang
- Chemical Grade Alumina (Bauksit) – Kendawangan, Kalimantan Barat  
Investasi Rp17,3 triliun, tenaga kerja 7.100 orang
- Oleoresins (Pala) – Fakfak, Papua Barat  
Investasi Rp1,8 triliun, tenaga kerja 1.850 orang
- Oleofood (Kelapa Sawit) – KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur  
Investasi Rp3 triliun, tenaga kerja 4.800 orang
- Produk Kelapa (Nata de coco, MCT, Coconut flour, Activated carbon) – Tayan, Riau  
Investasi Rp2,3 triliun, tenaga kerja 22.100 orang
- Chlor Alkali Plant (Garam) – Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Nusa Tenggara Timur  
Investasi Rp16 triliun, tenaga kerja 33.000 orang
- Fillet Tilapia – Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur  
Investasi Rp1 triliun, tenaga kerja 27.600 orang
- Carrageenan (Rumput Laut) – Kupang, NTT  
Investasi Rp212 miliar, tenaga kerja 1.700 orang
- Oil Refinery – 18 lokasi (Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, dll.)  
Investasi Rp160 triliun, tenaga kerja 44.000 orang
- Oil Storage Tanks – Lokasi sama dengan Oil Refinery  
Investasi Rp72 triliun, tenaga kerja 6.960 orang
- Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) – Batang, Jawa Tengah  
Investasi Rp24 triliun, tenaga kerja 19.500 orang
- Bioavtur (Used Cooking Oil) – KBN Marunda, Cikarang, Karawang  
Investasi Rp16 triliun, tenaga kerja 10.152 orang



# Kompak, 25 Negara Barat Dukung Gaza

tersebut, Israel malah menyalahkan Hamas sebagai sumber dari masalah itu. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pernyataan itu "tidak sesuai dengan kenyataan" dan akan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas.

1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

Distribusi bantuan kini menjadi titik krusial dalam krisis ini. GHF menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS, sebagian besar memotong sistem distribusi yang dipimpin oleh PBB.

Pernyataan 25 negara itu menuntut Israel untuk mematuhi hukum humaniter internasional, mencabut segala pembatasan bantuan, serta mengizinkan organisasi kemanusiaan dan PBB untuk beroperasi secara aman dan efektif di Gaza, dikutip Reuters.

"Kami siap mengambil langkah lebih lanjut untuk mendukung gencatan senjata segera dan jalur politik menuju perdamaian dan keamanan bagi rakyat Israel dan Palestina," bunyi pernyataannya.

Secara terpisah, pemerintah Inggris mengumumkan paket bantuan kemanusiaan sebesar 60 juta pound sterling atau setara Rp 1,31 triliun (dengan kurs 1 pound = Rp 21.990 per 22 Juli 2025) untuk mendukung upaya bantuan di Gaza.

Langkah ini menegaskan bahwa tekanan terhadap Israel tidak hanya datang dalam bentuk diplomatik, tetapi juga disertai komitmen konkret untuk meredakan penderitaan rakyat Palestina.

Sebagian besar wilayah Gaza telah menjadi gurun pasir selama lebih dari 21 bulan perang yang dimulai ketika militan pimpinan Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan membawa 251 sandera kembali ke Gaza, menurut penghitungan Israel. (ist/lut)

**Sebanyak 25 negara Barat, yang terdiri dari sekitar 20 negara Eropa serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru, menyatakan dukungan pada Gaza pada hari Senin (21/7/2025). Mereka meminta supaya Israel harus segera mengakhiri perangnya di Gaza, mereka juga mengkritik tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai "pembunuhan tidak manusiawi", termasuk ratusan orang di dekat lokasi distribusi makanan.**

ditujukan untuk warga sipil. Hamas membantah tuduhan tersebut.

PBB menyebut model GHF tidak aman dan melanggar standar imparialitas kemanusiaan, yang dibantah oleh GHF.

Negara-negara di balik pernyataan tersebut mengatakan Israel menolak bantuan kemanusiaan esensial dan meminta negara tersebut untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional.

Mereka mendesak Israel untuk segera mencabut pembatasan guna memungkinkan aliran bantuan dan agar organisasi kemanusiaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat beroperasi dengan aman dan efektif. Mereka menambahkan bahwa mereka "siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna mendukung gencatan senjata segera dan jalur politik menuju keamanan dan perdamaian" bagi warga Israel dan Palestina.

Dilansir dari Reuters, Selasa (22/7/2025), seruan ini menjadi signifikan mengingat banyak di antara negara-negara penandatanganan adalah sekutu dekat Israel, termasuk empat dari lima anggota aliansi intelijen Five Eyes—kecuali Amerika Serikat. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan mayoritas Eropa Barat menegaskan dukungan mereka terhadap gencatan senjata serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan.

Menanggapi pernyataan 25 negara

"Pernyataan tersebut gagal memfokuskan tekanan pada Hamas dan gagal mengakui peran serta tanggung jawab Hamas atas situasi ini," demikian pernyataan Israel melalui Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar.



*"Pernyataan tersebut gagal memfokuskan tekanan pada Hamas dan gagal mengakui peran serta tanggung jawab Hamas atas situasi ini,"*

**GIDEON SAAR**  
Menteri Luar Negeri Israel,

Israel menuduh sistem lama kerap disalahgunakan oleh Hamas untuk menyita bantuan, tuduhan yang dibantah keras oleh kelompok tersebut. Di sisi lain, PBB menilai pendekatan GHF tidak aman dan melanggar prinsip netralitas kemanusiaan.

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, menyebutkan pernyataan dari negara-negara Barat itu sebagai sesuatu yang "menjijikkan" dan menilai bahwa menyalahkan Israel adalah tindakan yang "tidak rasional," mengingat Hamas telah menolak berbagai upaya penyelesaian konflik.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 59.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Hamas menyerang Israel, menewaskan

